

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Wawasan
Media Online	.....

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

## Brebes Paling Buncit Pengelolaan Keuangan

**SEMARANG** - Kabupaten Brebes menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang belum mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Brebes diminta berupaya serius agar memperoleh penilaian tertinggi dari BPK tersebut.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan meskipun memiliki wilayah yang cukup luas dan persoalan yang kompleks, namun tidak ada alasan Brebes tidak WTP. Menurut Ganjar, semua lini harus didorong agar daerah itu bergerak menjadi lebih baik.

"Brebes harus didorong pada nilai-nilai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta membangun sistem integritas yang baik. Saya minta inspektorat mendampingi Brebes agar segera mendapat hasil positif," kata Ganjar, kemarin.

Bahkan Ganjar memberikan tenggat waktu kepada Brebes agar mendapat hasil WTP tahun depan. Segala upaya

harus dilakukan sebagai percepatan.

"Mudah-mudahan ada dukungan dan kerjasama yang baik dari Brebes untuk mereka mau mendorong dan membuat tim khusus," pungkasnya.

Dalam acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng yang digelar oleh Inspektorat Jateng beberapa waktu lalu, turut diluncurkan pula aplikasi e-Takon. Aplikasi khusus yang dibuat sebagai pemandu tentang pengelolaan pemerintahan. Tujuannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan memudahkan kinerja pemerintahan daerah.

"Aplikasi ini kami buat sebagai tempat konsultasi bagi daerah serta para pegawai negeri sipil mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Memang kami buat khusus untuk pegawai pemerintahan sebagai penunjang terwujudnya good government," kata Kepala Inspektorat Jateng, Hendri Santosa.

Hendri menerangkan, dalam aplikasi tersebut, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Nantinya, dalam waktu 1x24 jam, keluhan dan konsultasi akan ditindaklanjuti.

"Aplikasi ini kami buat agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi, kalau ada permasalahan tentang pengelolaan daerah, dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai ruang konsultasi," jelasnya. ■

smn/H81—sn